

**EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK
MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
(Studi Pada Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)**



**Disusun Oleh :
REINADA PRAMIFTHA FIRLYA
NIM : 1713111001**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2021**

**EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
UNTUK MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA**
(Studi Pada Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Disusun Oleh :
REINADA PRAMIFTHA FIRLYA
NIM : 1713111001

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik Universitas
Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh:

REINADA PRAMIFTHA FIRLYA

1713111001

Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.

NIDN : 0714119002

Pembimbing II



Diana Rahmawati,

NIDN : 0714056102

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.

NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik Universitas
Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

REINADA PRAMIFTHA FIRLYA
1713111001

Tanggal Ujian : 7 Juli 2021

Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714119002

Pembimbing II



Diana Rahmawati,
NIDN : 0714056102

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Penguji II



Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Penguji III



Drs. Ali Fahmi, M.Si.
NIDN : 27015801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

Dra. Tri Prasetijowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Reinada Pramiftha Firlya

NIM 1713111001

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan Bahwa Skripsi Berjudul :

“Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)”

Merupakan hasil karya tulis ilmiah yang bersifat original/bukan plagiasi baik sebagian atau keseluruhan. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi dalam karya tulis ilmiah dimaksud, maka saya bersedia dituntut sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Juni 2021

Yang Menyatakan



Reinada Pramiftha Firlya

NIM.1713111001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sukolilo Timur. Masalah kemiskinan sampai saat ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga harapan merupakan program pemberian bantuan sosial berupa uang tunai kepada keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat. Program keluarga harapan diharapkan mampu mengatasi kemiskinan pada masyarakat.

Penelitian ini berjudul “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukolilo Timur”, dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana tingkat efektivitas program keluarga harapan dan faktor pendukung maupun faktor penghambat dari program PKH di Desa Sukolilo Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sukolilo Timur tersebut berjalan dengan baik dan cukup efektif. Seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, pelaksanaan program, monitoring program semuanya berjalan dengan baik. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didukung oleh antusias pendamping PKH, faktor pendukung lainnya adanya dukungan dari Aparat Desa dan antusias masyarakat Desa Sukolilo Timur itu sendiri. Faktor penghambatnya tidak adanya dukungan dari aparat desa, tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan tidak adanya fasilitas yang menunjang untuk pendamping PKH.

Kata kunci: Efektifitas, Program Keluarga Harapan

Abstract

This research was conducted to determine "The Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) to Support the Welfare of the East Sukolilo Village Community". In this study, researchers describe how the level of effectiveness of the family of hope program and the supporting and inhibiting factors of the PKH program in East Sukolilo Village. This type of research is descriptive qualitative research. Data obtained through interviews, observation and documentation. Sources of research data are primary and secondary data. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results showed that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the village of East Sukolilo went well and was quite effective. The whole series or process of activities starting from the initial socialization, program implementation, program monitoring all went well. The success of the Family Hope Program (PKH) is strongly supported by the enthusiasm of PKH facilitators, other supporting factors are the support from the Village Apparatus and the enthusiasm of the East Sukolilo Village community itself. The inhibiting factors are the absence of support from village officials, the absence of awareness from the community and the absence of supporting facilities for PKH facilitators.

Keywords : *Effectiveness, PKH*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan rohmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)”*** guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh Sarjana Administrasi Negara di Universitas Bhayangkara.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Tri Prasetijowati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara;
2. Bapak Bagus Ananda K S.AP., M.AP, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara;
3. Bapak Drs. Heru Irianto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing selama pengerjaan skripsi di Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik;
4. Ibu Diana Rahmawati, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing selama pengerjaan skripsi di Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik;
5. Kedua Orang tua saya. yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Seluruh dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini;
7. Sahabatku Pujiarti Rukadini yang telah membantu dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan Elyna, Novia, Fransisca, Fira, Ristya yang selalu men-support dan menghibur sampai terselesaikannya skripsi ini;
9. Dan masih banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak doa, dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Besar harapan peneliti semoga semua perbuatan baik dapat diterima dan diridhoi Allah SWT. Selain itu, peneliti selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruannya.

Akhir kata, dengan harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surabaya, 21 Juni 2021

Penulis

Reinada Pramiftha Firlya

NIM.1713111001

MOTTO

“Kesuksesan bukanlah akhir, dan kegagalan juga bukan hal yang fatal.

Hal tersebut merupakan keberanian untuk melanjutkan apa yang
penting.”

Winston Churchill

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBARE PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	01
1.2 Rumusan Masalah	04
1.3 Tujuan Penelitian.....	04
1.4 Manfaat Penelitian.....	05
1.5 Definisi Konsep.....	05
1.6 Metode Penelitian.....	09
1.6.1 Lokasi Penelitian.....	10
1.6.2 Subyek Penelitian	10
1.6.3 Fokus Penelitian.....	10
1.6.4 Sumber Informasi	10
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6.6 Teknik Analisis Data	12

1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian	14
--	----

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	21
2.3 Tinjauan Pustaka	23
2.3.1 Tingkat Efektivitas Program Keluarga Harapan	23
2.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan.....	27
2.3.3 Solusi Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Harapan.....	33

BAB III GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

3.1 Deskripsi Tempat Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Visi dan Misi	40
3.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	41
3.4.1. Struktur Organisasi Desa.....	41
3.4.2. Uraian Tugas dan Fungsi.....	42
3.5 Program Keluarga Harapan (PKH)	48

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Tingkat Efektivitas PKH di Desa Sukolilo Timur	50
4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan PKH.....	68
4.3 Solusi Peningkatan Efektivitas PKH	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
Daftar Pustaka.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	17
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Konseptual	21
Gambar 2 : Struktur Organisasi Kantor Desa Sukolilo Timur.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara	94
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Penelitian	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih belum bisa teratasi dan selalu menimbulkan efek domino terhadap seseorang. Pada umumnya masyarakat yang masih terbelakang, berpenghasilan rendah, dan jika diukur dengan kebutuhan hidup minimum masih dibawah standar itulah yang kebanyakan orang mendefinisikannya sebagai masyarakat miskin. (Sumodiningrat, 1999;13).

Landasan hukum dan dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan tertera pada: 1. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2. Undang- undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, 3. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 4. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 5. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

Hal lain yang menguatkan dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu: 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, nomor 31/KEP/MONKO/-KESRA/IX/2007, tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007, 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tanggal 08 Januari 2008, 3) Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat.

Program ini memberikan bantuan uang secara tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan yang dimaksud yaitu terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini tidak sama dengan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. (Kepmensos, 2013:13).

PKH akan memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, PKH akan memberikan *income effect* kepada RTSM/KPM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan pendapatan anak dimasa depan anak keluarga miskin serta memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya (*insurance effect*). Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin

menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Adapun persoalan yang berkenaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini, yakni: (1) mengenai kevalidan data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan (2) mengenai besaran bantuan yang diterima.

Di Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota. Daerah-daerah yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan juga Gorontalo dengan harapan program ini berkesinambungan. Tujuan uji coba Program Keluarga Harapan ini adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, antara lain sasaran, validasi data verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, mulai tahun 2010 KEMENSOS menambah jumlah provinsi penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Indonesia.

Layaknya implementasi kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang dihadapi diantaranya kevalidan data penerima PKH dan besaran bantuan yang diterima. Masyarakat mengeluhkan banyak peserta yang layak mendapat program

ini tapi tidak terdata sebagai penerima PKH. Selain itu, ada juga indikasi adanya pemotongan penyaluran bantuan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan.

Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, merumuskan masalah tentang :

1. Bagaimana tingkat efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukolilo Timur?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung pelaksanaan keluarga harapan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa Sukolilo Timur?
3. Bagaimana solusi agar terjadi peningkatan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukolilo Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian, selalu ada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dari pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Sukolilo Timur
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sukolilo Timur
3. Untuk memberikan solusi agar mendapatkan peningkatan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukolilo Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Untuk melengkapi syarat akademis yang bersifat mutlak sesuai aturan kurikulum yang berlaku guna mencapai gelar sarjana bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya.

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.

1.5 Definisi Konsep

1.5.1 Efektifitas

Menurut Ravianto 2014:11, pengertian efektifitas yaitu seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Gibson et.al “Bungkaes 2013:46” Pengertian efektifitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi.

Menurut Beni (2016:69) Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Menurut Sondang P.Siagan memberikan definidi sebagai berikut : Efektifitas adalah pemnfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya yang telah ditetapkan. Jika kegiatan mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektifitasnya.

Atmosoeprapto (2002) menyatakan, efektifitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektifitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermati.

Menurut Mahmudi (2010) Efektifitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Landasan hukum Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi Negara-negara tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyusuan

harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan (Pedoman Umum PKH: 2012) merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan besyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesembungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan melenium (*Millennium Development Goals* atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapain pendidikandasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.

Masih banyaknya RTSM/KSM yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM/KSM (*deman side*) maupun sisi pelayanan (*supply side*). Pada sisi permintaan, alasan tersebar untuk tidak melanjutkan sekolah karena tidak adanya biaya, berkerja untuk mencari nafkan, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian juga halnya untuk kesehatan, RTSM/KSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarga akibat rendahnya tingkat pendapatan. Sementara itu permasalahan pada sisi pelayanan (*supply side*) yang menyebabkan rendahnya akses RTSM/KSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh RTSM/KSM.

Biaya pelayan yang tidak terjangkau oleh RTSM/KSM serta jarak antar tempat tinggal dan lokasi pelayan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayan pendidikan dan kesehatan dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM/KSM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTSM/KSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM/KSM yang berkerja. Sebaliknya, hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada. Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan

No	KATEGORI	BESARAN BANTUAN
1	Ibu Hamil/Nifas	Rp 3.000.000,-
2	Anak Usia Dini 0 s.d 6 Tahun	Rp 3.000.000,-
3	Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp 900.000,-
4	Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp 1.500.000,-
5	Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp 2.000.000,-
6	Penyandang Disabilitas Berat	Rp 2.400.000,-
7	Lanjut Usia	Rp 2.400.000,-

partisipasi sekolah anak khususnya SD dan SMP. Pembayaran bantuan dilakukan empat kali atau empat tahap dalam satu tahun.

Indeks dan Faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun

Sumber : <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>

1.5.3 Kesejahteraan

Kata “kesejahteraan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) berasal dari kata “ sejahtera “ yang berarti aman, sentosa, dan makmur. Sedangkan pengertian “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan yang aman, damai, sentosa, kesenangan hidup , selamat dan makmur.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat :

- a. Pendapatan
- b. Pengeluaran
- c. Tempat tinggal
- d. Kesehatan anggota keluarga
- e. Kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan
- f. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang Pendidikan
- g. Kemudahan mendapatkan transportasi

1.6 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka melainkan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana memperoleh informasi mengenai hal yang diteliti, penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sebagai tempat dimana data untuk variabel penelitian di peroleh dan ditentukan dalam kerangka pemikiran menurut Arikunto (2010). Dalam penelitian ini, subyek yang diambil sebagai sumber data yaitu masyarakat di Desa Sukolilo Timur dan Dinas Sosial.

1.6.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa (studi di desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan), maka fokus penelitian ini dibagi menjadi tiga sub fokus penelitian yaitu :

1. Tingkat efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Solusi peningkatan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)

1.6.4 Sumber Informasi

Sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi, media informasi untuk komunikasi massa. Sumber informasi dapat diperoleh melalui media cetak (surat kabar, majalah), media elektronik (televisi, radio, internet), dan melalui kegiatan tenaga kesehatan seperti pelatihan yang di adakan (Notoatmodjo, 2003). Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Sumber data primer dalam penelitian ini :

- a. Kepala Desa Sukolilo Timur
- b. Masyarakat / KPM Desa Sukolilo Timur

2. Data Sekunder : Dinas Sosial

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan serta langsung bertatap muka dengan informan. Dalam melakukan wawancara menggunakan alat bantu untuk mewawancarai informan seperti pulpen atau pensil, buku tulis (notes), surat izin atau surat tugas, soal yang telah disusun, alat perekam untuk merekam apa yang dikatakan oleh informan dan kamera untuk mengambil gambar yang sedang diwawancarai.
- 2) Observasi (Pengamatan) adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Penggunaan metode ini sangat dipengaruhi oleh interestnya peneliti. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat

untuk digunakan. Ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir.

Pengertian Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104).

- 3) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan program pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengelola data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan menemukan pola data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam analisis data kualitatif ada tiga tahap, yaitu :

- a. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks,

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

- b. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.
- c. Penarikan kesimpulan / verifikasi merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemkan oleh Tjetjep Reheni R. yang berjudul Analisis Data Kualitatif (1992), tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membangun Kerangka Konseptual
- b) Merumuskan Permasalahan Penelitian
- c) Pemilihan sampel dan pembatasan penelitian
- d) Instrumentasi
- e) Pengumpulan data
- f) Analisis data
- g) Matriks dan pengujian kesimpulan

Tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian dilakukan berawal dari permasalahan dalam peristiwa yang sedang berlangsung dan bisa diamati serta dapat diverifikasi secara nyata saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa yang diamati tersebut dalam konteks kegiatan orang atau organisasi.

- b. Memilih lapangan

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan penelitian kualitatif. Rekomendasi dari pihak yang terkait melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang dimiliki.

- c. Mengurus perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran penelitian ini, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan. Karena hal ini dapat mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal. Dengan adanya perizinan akan mengurangi ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

d. Menilai keadaan dan Melihat kondisi

Hal yang perlu dilakukan adalah proses melihat lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan. Karena kita yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga data yang tidak dapat digali atau diperoleh. Sebaliknya bahwa lapangan menerima kita dan dapat menggali atau memperoleh data karena mereka tidak terganggu.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Dengan kita mensosialisasikan diri ke lapangan, hal penting yang kita lakukan yaitu menentukan partner kerja sebagai “mata kedua” yang dapat memberikan informasi keadaan lapangan. Informan yang terpilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain maupun kita. Dan juga independen secara kepentingan penelitian.

f. Menyiapkan instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

g. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan lingkungan yang bermakna atau tidak dalam suatu penelitian

Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri dengan aspek keadaan yang dapat mengumpulkan data yang beragam sekaligus

1. Tiap situasi adalah keseluruhan, tidak ada instrumen berupa test atau angket yang dapat mengungkap keseluruhan secara utuh
2. Suatu interaksi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami oleh pengetahuan semata-mata
3. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh

4. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh
5. Dengan manusia sebagai instrumen respon yang aneh akan mendapat perhatian yang seksama (Sanafiah Faisal:1990).
- h. Etika dalam penelitian

Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tatacara dan tatahidup dalam suatu latar penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Dalam menghadapi persoalan tersebut peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bagian ini peneliti memaparkan dan memberikan penguraian mengenai penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dalam penetapan fokus yang diambil oleh peneliti. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang teori kebijakan publik yang peneliti gunakan sebagai analisis dalam melakukan penelitian ini . penggunaan teori dalamn penelitian ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Penyajian alur temuan dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan pijakan teoritik yang digunakan oleh peneliti dalam menganaliis permasalahan , selain hal tersebut kerangka konseptual penelitian juga disajikan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap pembaca dalam mengikuti alur penelitian ini.

2.1 Penelitian Tedahulu

Tabel 2.1

Pebandingan peneliti terdahulu

Peneliti	Hasil Penelitian
Cahyo Sasmito (2019) berjudul “Inplementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu”	Disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan telah berjalan dengan baik dan lancer. Komunikasi terjalin secara baik dengan Pendamping PKH, dan Peserta PKH.

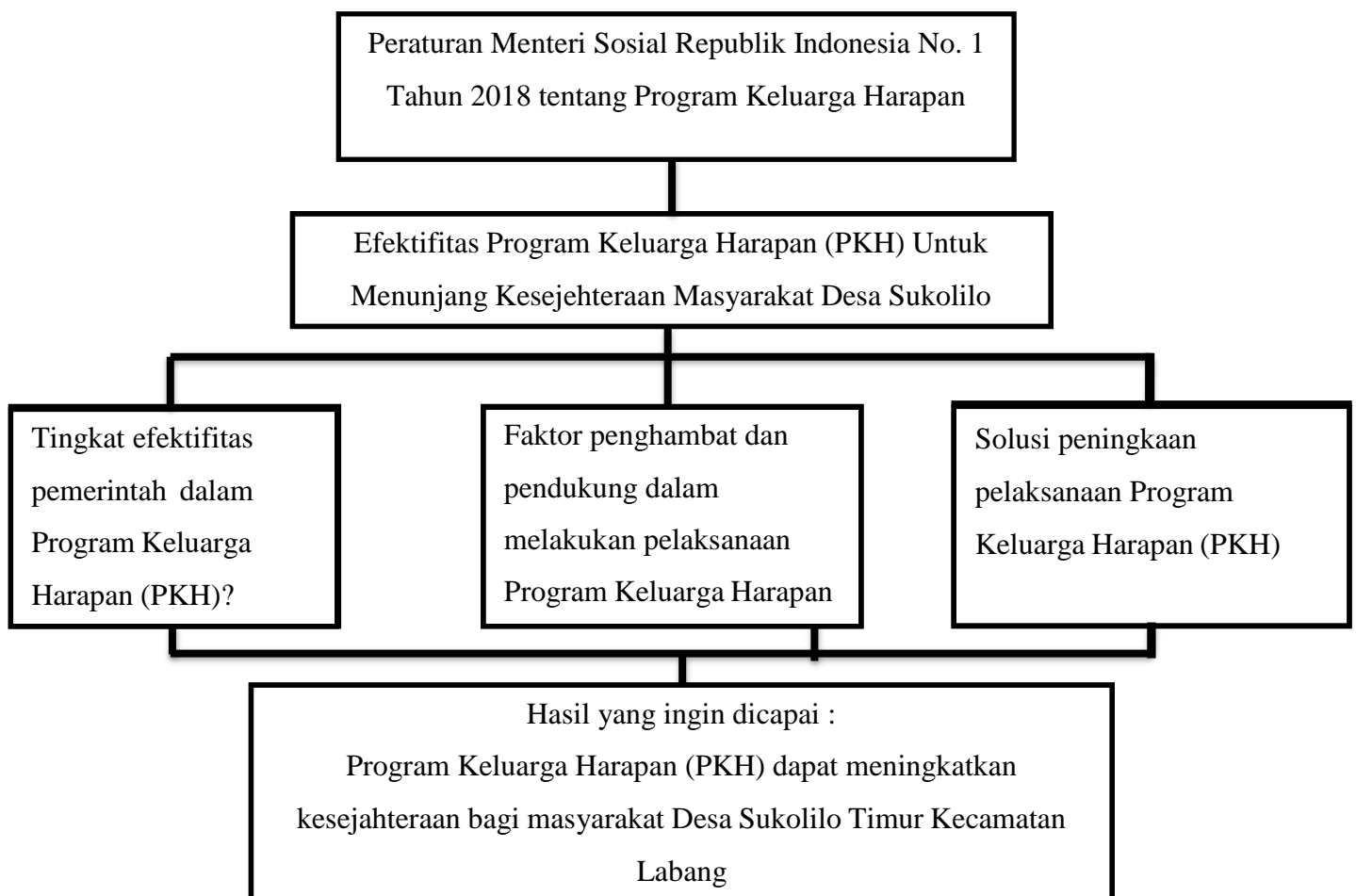
	<p>Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH dalam rapat koordinasi, seminar dan matrikasi sebagai bekal untuk meningkatkan profesional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial memberikan tugas pada Pendamping PKH untuk membantu Peserta PKH dalam memberikan penyuluhan terkait syarat dan ketentuan wajib yang harus dipenuhi Peserta PKH.</p>
<p>Rafiudin, Muhamad and Agustino, Leo and Haris, Deden M. (2016) berjudul “ IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK “</p>	<p>Disimpulkan bahwa implementasi PKH banyak mengalami kendala dan belum diimplementasikan dengan baik. Sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Pendataan peserta penerima PKH belum menyeluruh, masih banyak yang belum mendapatkan PKH. Pendampingan belum dilakukan dengan baik dan penggunaan dana PKH oleh RTSM kerap digunakan diluar ketentuan. Untuk jangka panjang belum bisa merubah pola pikir dan perilaku RTSM secara signifikan.</p>
<p>Felinda Wulandari, Yamardi Yamardi dan Titin Rohayatin</p>	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan belum efektif. Terlihat belum optimalnya pemberian</p>

<p>(2020) berjudul “ Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat”</p>	<p>bantuan, dana yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan keadaan PKH, selain itu dana yang diterima pendamping PKH juga tidak sesuai dengan pengeluarannya, dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pendamping kepada peserta PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya, masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.</p>
<p>Clara Dheby, Abdul Kadir Adys, dan Muhammad Idris (2017) berjudul “ Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar “ Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)</p>	<p>Menunjukkan bahwa PKH bidang kesehatan telah melaksanakan dengan baik layanan keuangan digital dan penyediaan fasilitas kesehatan. PKH bidang pendidikan belum memaksimalkan Pengentasan anak buta huruf dan penyediaan rumah singgah.</p>
<p>Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo (2017) berjudul “ Peran Pendamping dalam</p>	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping memiliki empat peran keterampilan yaitu peran fasilitatif, pendidik,</p>

<p>Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program “Keluarga Harapan”</p>	<p>representatif/perwakilan masyarakat, dan teknis. Faktor internal yang menjadi kendala adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data, dan beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu lama. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat sifatnya mendadak, jarak tempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh dan lokasi tempat pendampingan yang berada di gang sempit. Faktor pendukung adalah antusiasme penerima bantuan serta sarana yang memadai.</p>
<p>Umi Kalsum, Nurul Umiati, Hayat Hayat (2019) yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program</p>	<p>Menunjukkan bahwa, 1) secara umum implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cukup baik. ini dapat dilihat dari proses implementasinya yang berjalan sesuai dengan mekanisme alur kerja PKH, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang terjadi. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan adalah pendamping yang tidak tinggal di lokasi pendampingan sehingga sulit untuk melakukan pengontrolan secara langsung terhadap peserta</p>

<p>Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang “</p>	<p>PKH, masih banyak peserta PKH yang kurang paham terkait sasaran penerima manfaat PKH. 3) Penerima manfaat PKH di Desa Tamanasri dari 261 KK keluarga prasejahtera 180 KK sudah sah mejadi peserta PKH, namun masih ada 81 KK keluarga miskin yang non peserta PKH.</p>
--	---

2.2 Kerangka Konseptual



Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih, dimana penerima bantuannya adalah ibu. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM.

Efektivitas Program Keluarga Harapan didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTSM. Indikator- indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

- a) Tepat sasaran, PKH hanya diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang datanya bersumber dari desa/kelurahan tersebut.
- b) Cara kerja yang baik dan benar, proses administrasi yang benar dan dapat dipercaya.
- c) Produktif dalam pelayanan, pemberian materi maupun jasa yang tepat dan baik.
- d) Prestasi kerja, penilaian yang baik dari masyarakat atas kinerja dari aparat pemerintah.

2.3 Tinjauan Pustaka

2.3.1 Tingkat Efektivitas Program Keluarga Harapan

Ravianto (2014:11) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, akan menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Artinya jika pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dalam segi waktu, biaya dan mutunya akan dapat dikatakan efektif.

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, efektivitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Permata Weshha (1992:148) Efektivitas yaitu kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.

Handoko (2008:109) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah di tetapkan dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Efektifitas program dirumuskan sebagai tingkat sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010:26). Berdasarkan beberapa pengertian efektifitas diatas dapat disimpulkan bahwa, efektifitas adalah sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Suatu program dapat dikatakan efektif, apabila usaha yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektifitas menjadi tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2007:77), yaitu:

1. Tujuan yang akan dicapai, artinya supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan dapat tercapai.
2. Strategi mencapai tujuan, bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar tidak tersesat dalam pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjadi jembatan dari tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, akan menjadikan apa yang dikerjakan sekarang oleh organisasi untuk dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Apabila tujuan yang telah direncanakan oleh perusahaan terlaksana dengan baik, maka kegiatan perusahaan dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila tujuan perusahaan yang telah diirencanakan tidak terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Terdapat beberapa aspek efektivitas suatu program, antara lain:

a) Aspek Peraturan Dan Ketentuan

Efektivitas pada suatu aktivitas dapat dianggap tercapai dengan melihat berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam menjaga kelangsungan proses aktivitas tersebut. Aturan itu berhubungan dengan aturan baik yang berkaitan dengan peserta didik ataupun berkaitan dengan guru, apabila aturan itu berjalan dengan baik maka aturan atau ketentuan tersebut telah berjalan dengan efektif.

b) Aspek Fungsi Atau Tugas

Suatu perusahaan bisa disebut efektivitas apabila menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, begitu juga dengan model pembelajaran akan tercapai efektivitas apabila fungsi dan tugasnya berjalan dengan baik dan proses pembelajaran pada peserta didik berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

c) Aspek Program Atau Rencana

Arti dari aspek ini adalah rencana pembelajaran pada siswa yang terprogram dengan baik, apabila semua rencana dapat dijalankan dengan baik maka akan bisa disebut sudah mencapai efektivitas.

d) Aspek Kondisi Ideal Atau Tujuan

Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut mencapai efektivitas dilihat dari sudut hasil, apabila keadaan ideal atau tujuan program atau aktivitas diraih dengan baik. Penilaian pada aspek ini bisa dilihat dari keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Aspek-aspek efektifitas menurut Muasaroh (2010:13), efektifitas dapat dijelaskan bahwa efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain :

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektifitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Aspek rencana atau program, rencana yang terprogram, semua rencana yang dilaksanakan maka program atau rencana dapat dikatakan efektif
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektifitas suatu program dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat untuk menjaga proses kegiatan. Jika aturan dilaksanakan dengan baik maka ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dilihat dari sudut hasil. Jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

2.3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan

2.3.2.1 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang

perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
 - b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
 - c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
 - d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik; e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat.
- (Bambang Sunggono, 1994 :144-45).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak

sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

2.3.2.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil

- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab,1997:71-78).

Untuk melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan Teori George C. Edward III dan Mazmanian & Sabatier.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program.

3. Disposisi

Disposisi adalah faktor ketiga yang mempengaruhi suatu kebijakan selain komunikasi dan sumberdaya. Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

5. Lingkungan Kebijakan

Menurut Mazmanian & Sabatier, lingkungan kebijakan yang senyatanya terjadi dapat mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan, dalam penelitian ini menggunakan variabel kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi.

2.3.3 Solusi Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Harapan

Pengertian solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. (Munif Chatib : 2011) Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan solusi dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada. Jika tidak demikian maka solusi yang didapat akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik. Untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama kita perlu mengenali apa sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian kita cari fakta atau bukti mengenai permasalahan tersebut. Setelah itu kita telaah apa yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut. Setelah jelas masalah beserta latar belakangnya barulah kita dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Cara Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja

Berikut ini adalah penerapan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja :

1. Menyusun Prioritas Pekerjaan

Pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja adalah membuat prioritas pekerjaan. Dimana, harus bisa memilih dan memilah mana tugas yang sangat diprioritaskan untuk segera diselesaikan dan mana yang tidak harus diselesaikan.

Urutkan dari prioritas untuk segera diselesaikan. Sehingga, pekerjaan bisa dikerjakan sesuai dengan tingkat prioritasnya. Langkah ini sangat efektif, karena akan menjadi lebih fokus menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan satu per satu tanpa harus memikirkan yang lainnya.

2. Mengatur Waktu dan Disiplin

Harus bisa mengatur manajemen waktu. Artinya, harus tahu dan memahami berapa lama pekerjaan yang diberikan bisa diselesaikan. Jadi, tentukan pekerjaan yang paling lama memakan waktu untuk dijadikan prioritas utama. Selanjutnya, kerjakan bagian pekerjaan lainnya yang sekiranya membutuhkan waktu yang tidak lama.

Mengatur waktu dengan tepat dan benar akan membuat kamu lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

3. Membangun Rutinitas yang Tepat dan Sesuai

Kurangnya efektivitas dalam bekerja bisa dipengaruhi karena faktor kebiasaan. Kebiasaan menunda pekerjaan menjadi contoh yang akan membuat tidak bisa cepat menyelesaikan job yang bertanggung jawab. Jika

rutinitas dalam melaksanakan, maka dapat menyelesaikan setiap tugas dengan cepat karena tidak harus banyak berpikir.

Jadi, hindari kebiasaan buruk yang membuat pekerjaanmu menjadi menumpuk. Maka akan lebih bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa mengatur waktu dan menentukan prioritas dalam pekerjaan adalah hal mutlak yang dilakukan. Karena, dua hal tersebut sangat berpengaruh pada efektivitas sekaligus efisiensi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi, dengan beberapa cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi, akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dari pekerjaan kamu.

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26). Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.
- 2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik maka ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

M. As'ad (2001:47) menjelaskan setiap pekerjaan dapat dikatakan efektif ditentukan oleh pencapaian sasaran yang ditetapkan dan dengan menggunakan waktu yang dicapai, adalah :

- a. Kualitas kerja;
- b. Waktu yang dicapai;
- c. Efisien;
- d. Keterbukaan;
- e. Kecermatan dan ketelitian

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Jika dipandang dari sudut produktivitas, manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam

mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

3.1 Deskripsi Tempat Penelitian

Desa Sukokilo merupakan sebuah desa yang terletak di pulau Madura yang lebih tepatnya berada di kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa Sukolilo memiliki luas desa 214.60 ha. Desa sukolilo Timur dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Bunajih
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Timur : Desa Tebul Kecamatan Kwanyar
- Sebelah Barat : Desa Sukolilo Barat

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa Sukolilo Timur yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang berkembang di desa Sukolilo timur dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang Sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain. Dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Sukolilo Timur.

Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di desa Sukolilo Timur diantaranya :

1. Kegiatan pertanian tanaman pangan (padi, jagung, pala wija, dan lain-lain).
2. Kegiatan perkebunan buah-buahan seperti manga, sawo, kedondong, dan lain-lain.
3. Kegiatan peternakan (sapi, kambing, dan ayam).
4. Kegiatan perdagangan dan jasa
5. Kegiatan industri rumah tangga

3.2 Lokasi Penelitian

Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

3.3 Visi dan Misi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atas yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa, desa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberikan predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa SUKOLILO TIMUR adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pemerintah Desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan Desa SUKOLILO TIMUR yang adil, makmur dan sejahtera dalam lindungan dan Ridho Allah SWT “

Hakekat *Misi* Desa SUKOLILO TIMUR merupakan turunan dari Visi Desa SUKOLILO TIMUR. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa SUKOLILO TIMUR merupakan penjabaran lebih operasional dari Visi.

Misi adalah pernyataan yang mengarahkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa SUKOLILO TIMUR menetapkan Misi sebagai berikut :

Untuk meraih Visi Desa SUKOLILO TIMUR seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa SUKOLILO TIMUR diantaranya :

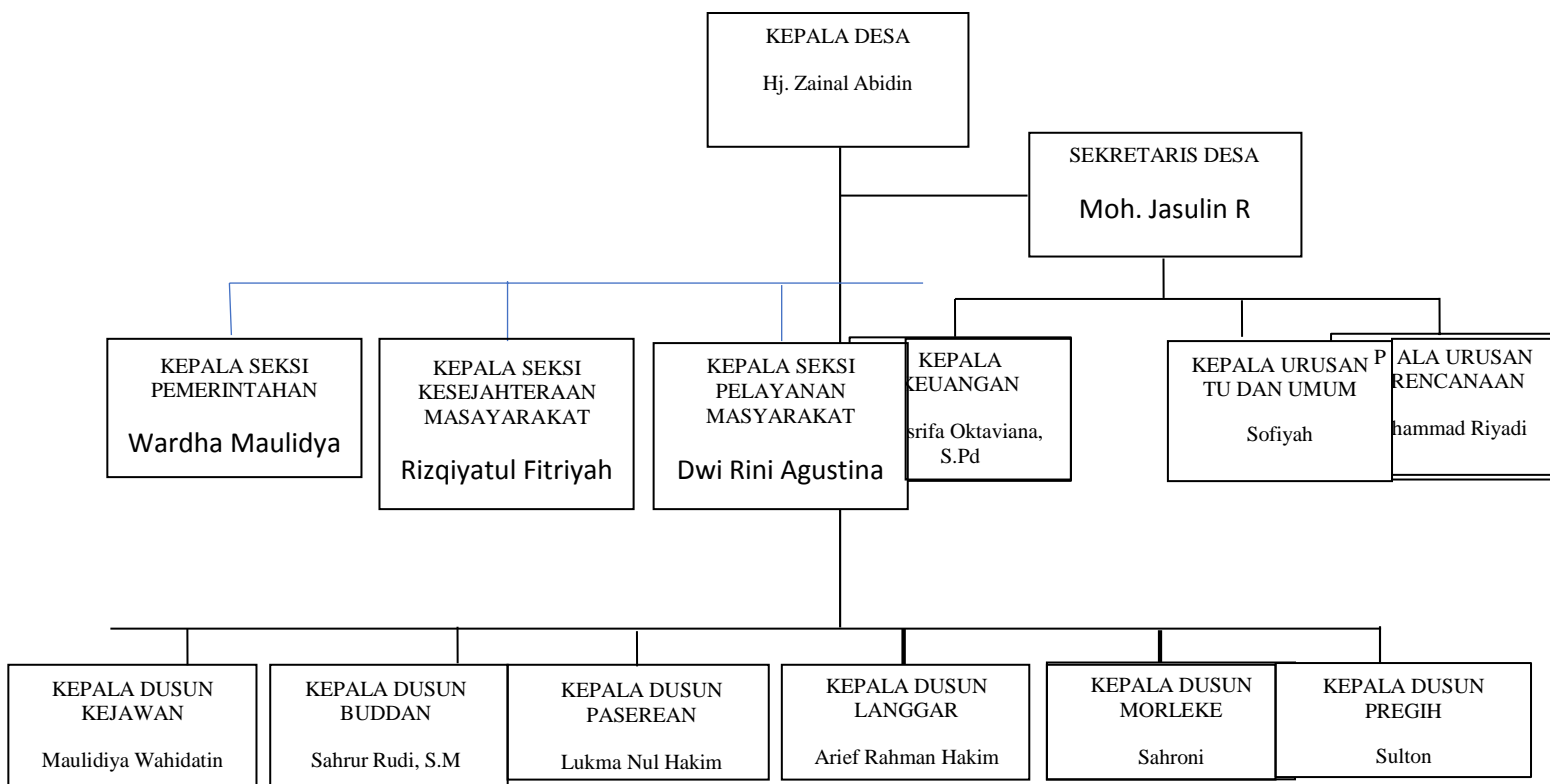
- a. Memberikan pelayanan yang prima, mudah, cepat dan tepat kepada masyarakat dengan didukung oleh aparatur desa yang profesional dan berkualitas.
- b. Melaksanakan pembangunan desa yang baik fisik maupun ekonomi produktif dengan mengikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan

serta pengawasan dengan menggunakan skala prioritas usulan dan kepentingan masyarakat.

- c. Membina dan menumbuh kembangkan semua organisasi / perkumpulan / Lembaga yang ada di desa.
- d. Memaksimalkan penggunaan potensi yang ada di desa baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- e. Melestarikan budaya yang ada di Desa.
- f. Menyampaikan amanah kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran.
- g. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan segenap lapisan masyarakat sehingga tercipta keamanan lingkungan.

3.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

3.4.1 Struktur Organisasi Desa



Sumber Tahun : 2019

3.4.2 Uraian Tugas dan Fungsi

3.4.2.1 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Desa

TUGAS KEPALA DESA :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

FUNGSI KEPALA DESA :

- a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti Tata Praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
- c. Pembinaan kemasyraktan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

3.4.2.2 Uraian Tugas dan Fungsi Sekertaris Desa

TUGAS SEKRETARIS DESA

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai Unsur Pimpinan Sekretariat Desa
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.

FUNGSI SEKRETARIS DESA

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, administrasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan, arsip, dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, penadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasialan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3.4.2.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Tata Usaha dan Umum

TUGAS KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai Unsur staf Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan / urusan pelayanan

administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum Pemerintahan Desa.

FUNGSI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi :
 - Menyusun rencana dan program kerja Urusan Tata Usaha dan Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan
 - Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya
 - Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah
 - Menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan administrasi yang meliputi :
 - Urusan surat menyurat, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan legalisasi
 - Urusan kearsipan
 - Urusan perlengkapan dan rumah tangga seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Desa
 - Menyelenggarakan dan meleksanakan ketatausahaan Kepala Desa
- c. Mendata kekayaan Desa yang meliputi;
 - Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan kekayaan Desa
 - Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan Desa
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa yang meliputi sarana prasarana Desa, kantor Desa, kebersihan, keindahan kantor / lingkungan Desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat / peralatan rapat dan lain-lain

- e. Menginventarisasi, merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana fisik Desa

3.4.2.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

TUGAS KEPALA URUSAN KEUANGAN

1. Kepala Urusan Keuangan sebagai Unsur staf Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan / urusan pelayanan administrasi keuangan Pemerintahan Desa.

FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN

- a. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan pemerintahan desa
- b. Melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa
- c. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Pemerintahan Desa
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan lainnya

3.4.2.5 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

TUGAS KEPALA PERENCANAAN

1. Kepala Urusan Perencanaan sebagai Unsur staf Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan / urusan pelayanan administrasi Perencanaan Pemerintahan Desa.

FUNGSI KEPALA URUSAN PERENCANAAN

- a. Melaksanakan koordinasi urusan perencanaan Pemerintah Desa
- b. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa

3.4.2.6 Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan

TUGAS KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai unsur pelaksana teknis, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
2. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana tugas operasional dalam majemen Pemerintahan Desa.

FUNGSI SEKSI PEMERINTAHAN

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data bidang pemerintahan
- b. Melaksanakan manajemen Tata Praja Pemerintahan Desa
- c. Menyusun rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa
- d. Melaksanakan Pembinaan masalah pertanahan Desa
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

3.4.2.7 Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Kesejahteraan

TUGAS KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

1. Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai unsur pelaksana teknis, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
2. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana tugas operasional dalam majemen Pemerintahan Desa.

FUNGSI SEKSI KESEJAHTERAAN

- a. Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana Desa
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana
- c. Melaksanakan pemberian sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup
- d. Melaksanakan pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya

3.4.2.8 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

TUGAS KEPALA SEKSI PELAYANAN

1. Kepala Seksi Pelayanan sebagai unsur pelaksana teknis, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
2. Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana tugas operasional dalam majemen Pemerintahan Desa.

FUNGSI KEPALA SEKSI PELAYANAN

- a. Melaksanakan Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa
- b. Melaksanakan upaya peningkatan pasrtisipasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Melaksanakan upaya pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan

3.4.2.9 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun

TUGAS KEPALA KEWILAYAHAN / KEPALA DUSUN

1. Pelaksana Kewilayahan atau Dusun sebagai unsur satuan tugas Kewilayahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Tugas di wilayahnya
2. Pelaksana Kewilayahan atau Dusun bertugas membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana tugas operasional dalam majemen Pemerintahan Desa.

FUNGSI KEPALA KEWILAYAHAN / KEPALA DUSUN

- a. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya

3.5 Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak PKH diluncurkan, keluarga yang masuk kategori miskin bisa menerima bantuan tunai dari pemerintah. Bagi warga miskin yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikator, rumah tempat tinggal penerima akan ditemplei stiker yang menunjukkan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan. Berikut kriteria penerima PKH 2021:

1. Kriteria komponen Kesehatan
 - a. Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan.
 - b. Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak.
2. Kriteria komponen Pendidikan
 - a. Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
 - b. Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat.

- c. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
 - d. Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial
- a. Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, dilakukan penyajian data dari hasil lapangan. Penyajian data merupakan kegiatan pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan, data yang dikumpulkan dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan pada bab ini diperoleh melalui penelitian lapangan, dilakukan mengumpulkan data, dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

4.1 Tingkat Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukolilo Timur

Ruang lingkup sebuah kebijakan publik sangat luas yang mencakup berbagai bidang dan sector yaitu ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya dan sebagainya. Kebijakan publik bersifat nasional, regional maupun local seperti undang-undang, peraturan Menteri, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah / provinsi, peraturan presiden, peraturan daerahkabupaten / kota, keputusan bupati / walikota, dan keputusan gubernur.

Implementasi Kebijakan adalah Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Artinya, bahwa proses implementasi tidak akan telaksana sebelum undang-

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ini menjadi permasalahan kemiskinan di Indonesia . kebijakan telah diambil oleh pemerintah dengan memberikan program bantuan tunai yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemberian bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Dan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial.

Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (basic saving account) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi, Subdit Kepesertaan, dan Subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan Terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Bantuan Sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pada dasarnya program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat / keluarga kurang mampu. Program ini merupakan pemecahan masalah antara masyarakat dan negara sebagai pengentasan kemiskinan. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memutus rantai kemiskinan bagi RTSM dan merupakan salah satu solusi baik dalam skala besar ataupun dalam skala kecil yaitu di desa. Terutama pada masyarakat desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang dimana peserta PKH atau yang disebut juga dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak hanya menerima

bantuan tunai saja, akan tetapi diharapkan dapat memberikan perubahan pola hidup dan perilaku yang menyangkut pendidikan dan juga perbaikan kesehatan. Dan juga dapat berdampak luas pada masyarakat desa Sukolilo Timur, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengupayaan peningkatan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sukolilo Timur ini, berikut peneliti menyajikan hasil wawancara yang dilakukan dengan pendamping PKH dan juga beberapa KPM untuk mengungkapkan bagaimana peran sertanya dalam upaya meningkatkan efektivitas program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sukolilo Timur.

Peneliti menanyakan sudah berapa lama Anda sebagai pendamping PKH di desa Sukolilo Timur

Sekitar kurang lebih 7 tahun mbak”. (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa

Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 27 Mei 2021)

Peneliti menanyakan apa peran pendamping PKH di desa Sukolilo Timur

Pendamping PKH berperan melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH seperti 1. Pertemuan awal, melakukan sosialisasi kepada KPM 2. Validasi, melakukan penjangkauan KPM mendapatkan data dari pusat untuk di validasi menjadi KPM 3. Pemutakhiran Data, dari data KPM dimutakhirkan ada perubahan jenjang dari SD ke SMP atau sebagainya. 4. Verifikasi komitmen kehadiran di layanan Pendidikan dan Kesehatan. 5. Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sebagai bahan untuk rekonsiliasi di desa. 6. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). 7. Melaksanakan penanganan pengaduan. 8. Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan”. (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 27 Mei 2021)

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh pendamping PKH desa Sukolilo Timur diatas dapat disimpulkan bahwa, peran pendamping sangatlah penting bagi KPM, karena sudah menjadi tanggung jawab pendamping untuk mendampingi KPM dalam hal melayani KPM jika mengalami kesulitan mengenai bantuan PKH. Seperti halnya, jika KPM yang sudah lanjut usia dan disabilitas tidak mengerti cara pengambilan bantuan PKH.

Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Direktorat Bantuan Sosial, (2007:4) pendampingan adalah suatu proses dalam memberi kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasikan kebutuhan dan memecahkan masalah ketika mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan

Adapun penjelasan mengenai peran pendamping yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), (Kementerian Sosial, 2018:31) yaitu :

1) Tugas Pendamping Sosial PKH

Pendamping Sosial PKH merupakan petugas yang melaksanakan pendampingan bagi para KPM PKH di tingkat kecamatan. Pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

2) Peran Pendamping Sosial PKH

Pendamping Sosial PKH berperan dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni :

- a. Pertemuan awal, adanya kegiatan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan serta memberikan informasi
- b. Validasi, ini termasuk penjarangan KPM mendapatkan data dari pusat kemudian kita validasi, nanti siapa yang masuk kategori atau tidak. Dari validasi itu didalamnya ada sosialisasi. Jadi, sebelum validasi harus ada sosialisasi dulu.
- c. Pemutakhiran data, dari data KPM kemudian mutakhirkan mungkin didalamnya ada perubahan jenjang dari SD ke SMP atau sebagainya
- d. Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan Kesehatan. Verifikasi ini ditingkat pendidikan dan kesehatan. Data dari pusat kita tinggal menyodorkan nama ke satuan Pendidikan (sekolah) dan kesehatan (puskesmas/posyandu).
- e. Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota. Merekonsiliasi, Pendamping menghitung dan mencocokkan siapa yang sudah siapa yang belum.
- f. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
- g. Melaksanakan penanganan pengaduan, mungkin nominal bantuan peserta PKH kurang.

- h. Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.

Dalam hal ini pendamping tidak hanya menjalankan tugas atau perannya saja, namun pendamping PKH sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan efektivitas PKH di desa Sukolilo Timur. Karena dengan adanya kemampuan atau cara kerja yang baik yang dilakukan oleh pendamping PKH tersebut akan memiliki dampak yang baik juga kepada peserta PKH atau KPM.

Dari penjelasan mengenai bagaimana peran pendamping tersebut, peneliti juga menyanyakan pendapat dari beberapa KPM di desa Sukolilo Timur. Peneliti menanyakan bagaimana peran pendamping dalam melakukan sosialisasi kepada KPM tentang program keluarga harapan?

Peran pendamping sangat membantu saya mbak dalam program ini, karena saya yang tidak tahu menulis dan membaca pun tidak terlalu lancar. Apalagi kalau ada kegiatan yang di informasi kan melalui media sosial seperti WhatsApp, saya tidak tau main handphone mbak. Saya dulu tidak sekolah mbak”. (Ibu Samiatun, selaku KPM di desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 21 Mei 2021)

Peran pendamping ibu Maryam ini melayani dengan ramah dan sabar mbak. Membantu juga jika ada KPM yang tidak bisa mengerti seperti penyandang disabilitas dan lansia”. (Ibu Sumriyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Pendamping membantu sekali dalam kegiatan sosialisasi mbak, kan ada yang tidak bisa membaca karena tingkat pendidikan yang rendah, jadi dengan adanya pendamping informasi yang diberikan bisa tersampaikan dengan jelas kepada KPM”. (Ibu Subaideh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Ibu Maryam itu membantu mbak, sebagai pendamping itu sudah menjadi kewajiban untuk membantu atau mendampingi KPM yang tidak mengerti dalam

kegiatan sosialisasi”. (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Sangat membantu mbak, pokoknya ibu Maryam tidak pernah menolak jika diberikan keluhan untuk meminta bantuan, selalu bilang iya dan menjelaskan kembali informasi yang telah di berikan saat kegiatan sosialisasi”. (Ibu Rukaiyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, peran pendamping sangatlah penting bagi KPM, karena sudah menjadi tanggung jawab pendamping untuk mendampingi KPM dalam hal melayani KPM jika mengalami kesulitan mengenai bantuan PKH. Seperti halnya, jika KPM yang sudah lanjut usia dan disabilitas tidak mengerti cara pengambilan bantuan PKH.

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

Peneliti juga menanyakan tentang apakah kegiatan sosialisasi PKH berpengaruh dalam meningkatkan efektifitas Program Keluarga Harapan di desa Sukolilo Timur.

Iya mbak berpengaruh dalam meningkatkan efektifitas PKH tersebut dan juga berpengaruh bagi kami sebagai penerima PKH, soalnya bisa mendapatkan informasi lebih jelas lagi mbak”. (Ibu Rukayeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 21 Mei 2021)

Sangat berpengaruh mbak, kalau kegiatan sosialisasi tidak berjalan dengan lancar dan pendamping tidak menjelaskan dengan baik. Tidak sesuai dengan materi PKH, ya tidak dapat meningkatkan efektifitas PKH mbak”. (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Berpengaruh mbak, kegiatan sosialisasi juga menjadi salah satu meningkatkan efektifitas dari program PKH ini. Kalau sosialisasi tidak dilaksanakan ya tidak efektif mbak program PKH”. (Ibu Subaidah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa, kegiatan sosialisasi sangat berpengaruh bagi KPM dan juga dapat meningkatkan efektifitas PKH. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan agar semua KPM paham mengenai bantuan PKH, dan juga untuk mengantisipasi adanya disinformasi yang ada di masyarakat. Namun, kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya sekedar memberikan informasi mengenai bantuan PKH saja, melainkan juga berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis mengenai perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Pemberian informasi tambahan tersebut dapat disebut juga dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang disampaikan oleh pendamping pada saat melakukan kegiatan rutin bulanan tersebut.

Kegiatan P2K2 tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH atau KPM tentang bagaimana pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga dimasa yang akan datang. Kegiatan tersebut juga berupaya untuk meningkatkan hubungan masyarakat dan memperluas serta membangun jaringan antar satu individu dengan yang lainnya agar terjalin dengan baik. Kegiatan P2K2 tersebut juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan efektivitas program PKH.

Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), (Kementerian Sosial, 2018:13) bentuk Edukasi dan Sosialisasi dapat dilakukan antara lain :

- Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya dan diskusi
- Komunikasi tatap muka/kelompok
- Media cetak (poster, selebaran, surat kabar)
- Media elektronik (radio, TV)
- Media Sosial (website, facebook, e-mail, twitter, whatsapp).

Kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup paling sedikit mengenai :

- Kebijakan PKH
- Produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial termasuk jenis tabungan/kartu, maksimal transaksi, aktivasi, penggantian PIN dan fasilitas lainnya.

- Tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
- Manfaat menabung

Jika dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, peran pendamping memang sangat penting dan berpengaruh bagi KPM yang maih kurang dalam pemahaman informasi yang disampaikan dan juga bisa menambah wawasan mengenai pendidikan, kesehatan yang disampaikan oleh pendamping. KPM yang tidak mengerti sosial media ataupun juga tidak dapat membaca dan menulis, bisa belajar dengan adanya pertemuan atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping dengan cara menjelaskan atau mempresentasikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh KPM yang sudah lanjut usia. Sehingga KPM juga dapat menanyakan hal yang kurang dipahami melalui pertemuan tersebut. Hal tersebut juga menjadi salah satu yang faktor yang dapat mencapai keberhasilan program PKH dan menjadi lebih efektif.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan

dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif jika dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Peneliti menanyakan tentang bagaimana proses penyaluran / pencairan bantuan Program Keluarga Harapan ke masyarakat dalam membantu meningkatkan efektivitas di desa Sukolilo Timur

Proses penyaluran / pencairan awalnya melalui kantor pos, karena banyak KPM yang mengeluh pada saat mengambil bantuan. Kantor pos juga terbilang lumayan jauh dari tempat tinggal KPM. Jadi proses pencairan berubah semenjak dari tahun 2016 penyaluran / pencairan bantuan dilakukan melalui pemberian ATM kepada KPM, guna memudahkan KPM untuk tidak kerepotan dalam melakukan pengambilan bantuan PKH. Jadi lebih efektif mbak” (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH di desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 27 Mei 2021)

Pencairan sekarang melalui ATM mbak, jadi lebih mudah untuk mengambil uangnya. Dulu itu melalui kantor pos mbak, kalau melalui kantor pos terus pas jadwalnya pencairan jadi rame kan mbak banyak yang ambil. Lebih efektif adanya ATM ini mbak bisa diambil sewaktu-waktu juga”. (Ibu Sumriyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dulu awalnya pengambilan di kantor pos mbak, terus banyak yang complain juga kalau mengambil di kantor pos situ lama antri. Jadi sekarang pakai ATM mbak, gak ribet juga mengambilnya kapan saja bisa ga perlu antri lama”. (Ibu Samiatun, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Enak mbak sekarang pakai ATM, tidak perlu antri lama ke kantor pos”. (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya perubahan penyaluran/ pencairan bantuan PKH menggunakan ATM dapat memudahkan KPM dalam pengambilan bantuan. Bantuan dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak harus mengantri lama seperti pengambilan melalui kantor pos. Apabila ada KPM yang tempat tinggalnya jauh dari mesin ATM, KPM bisa mengambil bantuan melalui agen *BRI link* yang terdekat. Hal tersebut juga

menjadi lebih efektif dibandingkan dengan proses pencairan yang sebelumnya melalui kantor pos. Karena jika penyaluran bantuan tetap dilakukan melalui kantor pos, banyak KPM yang mengeluh karena tempat tinggal yang jauh dari kantor pos dan juga masih harus mengantri. Dengan adanya masyarakat atau warga di desa Sukolilo Timur yang menjadi agen-agen dari *BRI link* juga sangat membantu para penerima bantuan atau KPM tersebut.

Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), (Kementerian Sosial, 2018:23) dijelaskan bagaimana penarikan dana bantuan sosial PKH, yaitu :

- a. KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di ewarong/Agen Bank/ATM.
- b. Dana PKH yang terdapat di rekening tabungan KPM dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan.
- c. Untuk selanjutnya, setiap KPM melakukan pengecekan saldo di setiap tahap penyaluran.
- d. KPM lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan dana PKH oleh pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank.
- e. Transaksi penarikan bantuan oleh pendamping sebagaimana pada poin d wajib didampingi keluarga/wali dari penerima dan langsung

diserahkan kepada keluarga/wali sesuai dengan jumlah yang telah ditarik.

- f. Pendamping melaporkan ke Koordinator Kab/kota jumlah KPM yang telah menerima Bansos PKH di tabungan.
- g. Koordinator Kab/kota selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada Dinsos Kabupaten/Kota sebagai bahan rekonsiliasi hasil penyaluran bansos PKH dengan kantor cabang Bank Penyalur.

Efektivitas Program Keluarga Harapan didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTSM /KPM. Indikator- indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

- a) Tepat sasaran, PKH hanya diberikan kepada masyarakat atau keluarga yang kurang mampu data bersumber dari desa/kelurahan tersebut. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan

perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah :

- Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Daerah tertinggal/terpencil; dan atau
- Perbatasan antar negara

(<https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181009100838.pdf>)

Peneliti menanyakan apakah bantuan PKH ini sudah tepat sasaran dalam menjadikan calon KPM

Ada yang tidak tepat sasaran mbak, saya tahu ada keluarga yang mampu tetapi mereka mendapatkan bantuan pkh ini. Sedangkan ada keluarga yang kurang mampu dan sangat membutuhkan malah sebaliknya tidak dapat bantuan pkh". (Ibu Subaidah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Sejauh ini yang saya tau tepat sasaran semua mbak, ada tetangga saya yang mampu mau mengajukan menjadi KPM tapi saya tegor mbak, karena itu kan untuk keluarga yang kurang mampu mbak". (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Tepat sasaran mbak, semua disini keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan PKH ini. Tapi tidak juga ya mbak kalau ada keluarga mampu juga yang dapat bantuan ini, mungkin saya tidak kenal orangnya dan rumahnya apa orang itu mampu atau tidak. Bisa jadi juga ada yang dapat mbak, tapi yang saya tahu yang kurang mampu mbak". (

Ibu Sumriyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, ada KPM yang mengetahui jika ada penerima bantuan PKH yang mampu tetapi diberikan dan dijadikan KPM. Tetapi ada juga salah satu masyarakat yang tahu bantuan ini tepat sasaran kepada keluarga yang kurang mampu. Jadi kesimpulannya, pendamping harus melakukan survey ke lapangan guna mengetahui calon penerima bantuan sebagai keluarga yang mampu atau tidak mampu. Dengan begitu bisa menjadikan bantuan ini tepat sasaran dan efektif.

- b) Cara kerja yang baik dan benar, bisa memberikan peningkatan dalam suatu program. Tahap melaksanakan perencanaan dimana langkah ini lebih mudah daripada merencanakan pemecahan masalah, yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan ketekunan dan ketelitian untuk mendapat penyelesaian.

Peneliti menanyakan tentang bagaimana cara kerja seorang pendamping dalam memberikan informasi dan bantuan kepada KPM

Bu Maryam ramah mbak, cara kerjanya juga baik dan benar. Sabar menjelaskan informasi yang pastinya kami semua sebagai KPM kadang tidak mengerti maksud dari informasi yang diberikan”. (Ibu Samiatun, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Cara kerja bu Maryam bagus mbak, saya kalau tidak paham dan kadang lupa informasi yang diberikan bu Maryam menjelaskan kembali informasi yang tadi dijelaskan. Terus juga kalau untuk lansia dan penyandang disabilitas di dampingi untuk mengambil uang”. (Ibu Sumriyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Bagus mbak sebagai pendamping, mengerti KPM nya yang punya pendidikan yang rendah seperti saya ini mbak. Baik lah mbak cara kerja

nya efektif juga”. (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, cara kerja bu Maryam sebagai pendamping sangat baik dan benar dalam mendampingi KPM untuk memberikan informasi dengan sabar kepada KPM yang memiliki pendidikan yang rendah dan juga lansia penyandang disabilitas sangat mendampingi dengan sabar dan tidak pernah mengeluh.

- c) Produktif dalam memberikan materi dan pelayanan yang baik dan tepat..

Peneliti menanyakan tentang bagaimana pendamping memberikan materi saat kegiatan sosialisasi

Materi yang diberikan sangat jelas mbak, terkadang ya kita juga lupa apa yang sudah di informasikan sama pendamping. Materi yang diberikan juga tepat sesuai dengan materi tentang PKH”. (Ibu Sumriyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Kegiatan sosialisasi yang diberikan materinya sangat jelas mbak mudah dipahami, tidak berbelit, gambar juga jelas. Produktif mbak bu Maryam itu selaku pendamping, pelayanan juga tidak ribet”. (Ibu Rukaiyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pendamping melakukan pelayanan dan pemberian materi pada KPM sangat jelas tidak berbelit jadi KPM senang dengan cara kerja pendamping PKH ini.

d) Prestasi kerja, penilaian yang baik dari masyarakat atas kinerja dari aparat pemerintah. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasari atas kecapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Keberhasilan dari suatu personalia adalah prestasi kerja. Karena baik departemen itu sendiri maupun karyawan memerlukan umpan balik atas upayanya masing-masing. Maka prestasi kerja dari setiap karyan perlu dinilai. Oleh, karena itu penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja

Peneliti menanyakan bagaimana menurut KPM penilaian cara kerja pendamping PKH desa Sukolilo Timur

Penilaian saya sangat baik mbak, dari cara kerjanya seperti menyampaikan informasi, mendampingi KPM yang lansia dan penyandang disabilitas dengan senang hati melayani. Pokoknya baik mbak sebagai pendamping”. (Ibu Samiatun, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Cukup baik mbak cara kerja bu Maryam, sesuai dengan apa yang dijelaskan dan di kerjakan. Sabar juga mbak sama KPM yang kadang lupa apa yang sudah di informasikan”. (Ibu Rukaiyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Cara kerja bu Maryam selaku pendamping bagus mbak, yang dikerjakan juga efektif jelas sesuai apa yang di informasikan”. (Ibu Subaideh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Baik mbak penilaiannya, karena pelayanan pendampingan dan penyampaian informasi yang tepat dan baik”. (Ibu Sumriyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Baik mbak, cara kerja yang dilakukan rapi, jelas kalau menyampaikan informasi”. (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, cara kerja ibu Maryam selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur melayani dan mendampingi KPM dengan jelas, tepat, sabar. Jadi penilaian yang diberikan KPM kepada ibu Maryam rata-rata memberikan nilai yang “BAIK” sebagai pendamping.

4.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung pelaksanaan keluarga harapan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa Sukolilo Timur

Dalam tingkat efektifitas yang dilakukan untuk memiliki tujuan yaitu meningkatkan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH). Tentu saja memiliki faktor penghambat dan faktor meningkatkan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut ini hasil dari wawancara mengenai factor pendukung dan factor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

- 1) Faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan efektifitas

Faktor Dukungan : Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Peneliti menanyakan apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program keluarga harapan di desa Sukolilo Timur

Pastinya dukungan dari kepala desa mbak dan instansi pemerintah yang memberikan bantuan ini, karena untuk mengetahui data KPM agar tepat

sasaran”. (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 27 Mei 2021)

Ya dukungan dari pemerintah dan kepala desa mbak, terutama ya pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa menjadi factor pendukung ekonomi masyarakatnya ya siapa lagi”. (Ibu Subaidah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Pemerintah pastinya mbak, pemerintah ingin meringankan beban masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Tidak ada dorongan dan bantuan dari pemerintah ya anak-anak banyak juga yang tidak bisa bersekolah karena orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan”. (Ibu Samiatun, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah berperan penting menjadi faktor pendukung dalam memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, sehingga pemerintah memberikan bantuan tunai yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Kepala desa juga menjadi pendukung bagi masyarakatnya yang kurang mampu, dan memberikan bantuan kepada KPM yang tepat sasaran.

Analisis ekonomi pelaksanaan PKH merupakan uapaya mengurangi beban rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat yang kurang mampu atau miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan non pangan seperti, untuk pendidikan, kesehatan, listrik, membayar sewa rumah dan lain sebagainya. Pemerintah menganggap terlalu tinggi dan membebani biaya rumah tangga miskin. Maka perlu meningkatkan pengurangan beban pengeluaran untuk membantu masyarakat penerima dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Peneliti menanyakan tentang bagaimana tanggapan masyarakat desa Sukolilo Timur terhadap Program Keluarga Harapan

Ya program ini sangat membantu kebutuhan saya mbak, alhamdulillah mbak dengan adanya PKH ini dapat meringankan beban saya dan keluarga mbak. Anak saya juga bisa bersekolah sampai tamat, karena saya dulu sekolah sampai SD tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi". (Ibu Subaidah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara ini dilakukan 21 Mei 2021)

Sangat bermanfaat adanya program PKH ini mbak, bersyukur sekali anaknya saya bisa melanjutkan sekolah lagi, ada biaya untuk anak sekolah. Meringankan ekonomi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan mbak". (Ibu Rukaiyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Membantu kebutuhan orang tua, lansia dan penyandang disabilitas. Dapat meningkatkan ekonomi keluarga yang kurang mampu". (Ibu Sumriyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Alhamdulillah pemerintah sudah membantu, dengan adanya program PKH ini kebutuhan anak sekolah bisa terpenuhi mbak". (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari beberapa wawancara yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa, Program Keluarga Harapan ini sangat membantu dan meringankan beban KPM sehingga anak-anak mereka dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi.

Dalam hal faktor pendukung untuk melaksanakan program PKH tersebut, peran pemerintah desa sangat penting untuk memberikan dukungan seperti melakukan kordinasi-kordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan program PKH. Dukungan tersebut dapat berupa finansial yang mencukupi, dan juga menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan sosialisasi yang biasa dilaksanakan oleh pendamping PKH dan peserta PKH. Dengan adanya dukungan dari pihak-

pihak terkait tersebut maka akan dapat membantu kesuksesan program PKH dan diharapkan nantinya dapat mampu meningkatkan kualitas hidup RTSM.

2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Untuk melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Penelitian ini menggunakan Teori George C. Edward III dan Mazmanian & Sabatier :

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian

Memahami masalah, pelajar sering gagal dalam menyelesaikan masalah karena semata-mata mereka tidak memahami masalah yang dihadapinya. Untuk dapat memahami suatu masalah yang harus dilakukan adalah pahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi yang diperoleh cukup, kondisi/syarat apa yang harus terpenuhi, nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang lebih operasional sehingga mempermudah untuk dipecahkan. Kemampuan dalam menyelesaikan

masalah dapat diperoleh dengan rutin menyelesaikan masalah. Selain itu, ketertarikan dalam menghadapi tantangan dan kemauan untuk menyelesaikan masalah merupakan modal utama dalam pemecahan masalah.

Namun dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, dapat dijadikan acuan evaluasi oleh pendamping agar kedepannya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program PKH. Dan pendamping juga bisa mencari solusi dari permasalahan yang didapat, agar semua peserta PKH mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Peneliti menanyakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan sosialisasi program keluarga harapan terhadap KPM

Mungkin ada KPM yang tidak pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi mbak, jadi tidak pernah tahu informasi apa saja yang saya sampaikan setiap pertemuan. Dan juga sering terjadi disinformasi, jadi jika ada suatu kesalahan pada KPM tersebut sering menyalahkan kami sebagai pendamping, padahal KPM tersebut tidak pernah menghadiri sosialisasi”. (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 27 Mei 2021)

Paling ya hambatannya kalau ada KPM yang tidak paham apa materi yang dibahas, tapi KPM tersebut waktu pendamping menjelaskan materinya malah asik sendiri berbincang dengan KPM yang lain”. (Ibu Samiatun, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Tidak ada hambatan mbak sejauh ini saya menjadi penerima PKH, pendamping juga menjelaskan dengan baik untuk kegiatan sosialisasi. Jadi semua berjalan dengan lancar tidak ada hambatan mbak”. (Ibu Subaidah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Biasanya itu mbak, kalau ada KPM yang tidak pernah hadir saat pertemuan. Tidak menjaga komitmennya sebagai penerima PKH, padahal kalau tidak datang saat pertemuan dikenakan sanksi berupa membayar denda di setiap kelompok. Tetapi penerima tersebut masih saja tidak pernah datang di pertemuan, tidak memiliki tanggung jawab sama sekali”.

(Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, penghambat dalam pendampingan PKH yaitu KPM itu sendiri yang tidak mengikuti aturan dalam PKH.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang penting tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Baik institusi maupun perusahaan, Sumber Daya Manusia adalah hal yang utama untuk menentukan perkembangan sebuah perusahaan. Sumber Daya Manusia berupa manusia yang bekerja di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan. Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi

Dalam teori George C. Edward terdapat tiga hal yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu transmisi yang baik, kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan, dan konsistensi informasi. Dalam pelaksanaan PKH komunikasi penting perannya dalam

menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan program terlebih program ini merupakan program dari pemerintah pusat yang membutuhkan suatu bentuk penyampaian informasi yang baik hingga sampai kepada lapisan yang paling bawah. Sosialisasi menjadi salah satu langkah yang penting untuk dilaksanakan dalam PKH, untuk tingkat pusat sampai tingkat kabupaten sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Kementerian lain yang terlibat sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi PKH kepada kelompok beneficiaris/peserta PKH dan masyarakat dilakukan oleh instansi terkait.

Peneliti menanyakan bagaimana hambatan dalam melakukan sosialisasi di desa Sukolilo Timur

Faktor usia mbak dan juga karena faktor pendidikan yang sangat rendah ada juga yang tidak bersekolah. Jadi, banyak KPM yang diberikan informasi mereka sering sekali lupa dan kalau yang faktor usia mereka sulit untuk mengingat informasi yang disampaikan. Jadi saya menginformasikan kepada perwakilan KPM untuk menyampaikan informasi dari pendamping". (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 27 Mei 2021)

Kalau semua penerima PKH berkomitmen dan bertanggung jawab dengan ketentuan dari program PKH ini, ya mungkin tidak kesulitan dalam meningkatkan efektifitas program ini mbak. Maka kita sebagai penerima juga harus bisa saling membantu sama pendamping untuk meningkatkan efektifitas. (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Kerjasama dengan pendamping bisa meningkatkan efektifitas program PKH. Kalau sama-sama melakukan yang terbaik dan bisa saling membantu jadi lebih efektif. (Ibu Subaidah, selaku KPM desa Sukoli Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor pendidikan dan faktor usia yang menjadi hambatan bagi pendamping PKH. KPM yang datang terlambat dan juga tidak pernah datang sama sekali dalam pertemuan menjadi hambatan bagi setiap kelompok penerima PKH.

Peneliti menanyakan bagaimana hambatan pendamping dalam kegiatan sosialisasi pada saat ada pertemuan

Yang sulit itu lansia mbak, karena kan juga faktor usianya sudah tua jadi sulit mengerti materi yang telah di informasikan. Dan disabilitas juga sulit, mereka juga punya keterbatasan masing-masing mbak jadi saya harus memberikan informasi melalui anggota keluarga mereka”. (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan pada 27 Mei 2021)

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, faktor komunikasi juga menjadi hambatan bagi pendamping terutamanya lansia dan disabilitas. Karena kondisi fisik yang kurang memungkinkan, maka pendamping menyampaikan informasi kepada anggota keluarga yang bersangkutan.

Hambatan-hambatan tersebut lebih mengacu pada permasalahan dalam komunikasi yaitu penyampaian informasi dari pendamping kepada KPM yang terkadang masih sulit memahami informasi tersebut. Dan juga faktor lainnya disebabkan karena watak dan sikap dari KPM itu sendiri yang kurang bertanggungjawab dalam kewajibannya sebagai peserta PKH, seperti halnya dalam partisipasi kehadiran untuk kegiatan sosialisasi. Ketidakhadiran peserta PKH dalam kegiatan sosialisasi dapat menyebabkan disinformasi yang nantinya bisa menyalahkan pendamping.

Namun dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, dapat dijadikan acuan evaluasi oleh pendamping agar kedepannya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program PKH. Dan pendamping juga bisa mencari solusi dari permasalahan yang didapat, agar semua peserta PKH mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4.3 Solusi peningkatan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukolilo Timur

Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Jika tidak demikian maka solusi yang didapat akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik. Untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama kita perlu mengenali apa sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian kita cari fakta atau bukti mengenai permasalahan tersebut. Setelah itu kita telaah apa yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut. Setelah jelas masalah beserta latar belakangnya barulah kita dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Cara Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja

Berikut ini adalah penerapan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja

1. Menyusun Prioritas Pekerjaan

Pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja adalah membuat prioritas pekerjaan. Dimana, harus bisa memilih dan memilah mana tugas yang sangat diprioritaskan untuk segera diselesaikan dan mana yang tidak harus diselesaikan.

Urutkan dari prioritas untuk segera diselesaikan. Sehingga, pekerjaan bisa dikerjakan sesuai dengan tingkat prioritasnya. Langkah ini sangat efektif, karena akan menjadi lebih fokus menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan satu per satu tanpa harus memikirkan yang lainnya.

2. Mengatur Waktu dan Disiplin

Harus bisa mengatur manajemen waktu. Artinya, harus tahu dan memahami berapa lama pekerjaan yang diberikan bisa diselesaikan. Jadi, tentukan pekerjaan yang paling lama memakan waktu untuk dijadikan prioritas utama. Selanjutnya, kerjakan bagian pekerjaan lainnya yang sekiranya membutuhkan waktu yang tidak lama. Mengatur waktu dengan tepat dan benar akan membuat kamu lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

3. Membangun Rutinitas yang Tepat dan Sesuai

Kurangnya efektivitas dalam bekerja bisa dipengaruhi karena faktor kebiasaan. Kebiasaan menunda pekerjaan menjadi contoh yang akan membuat tidak bisa cepat menyelesaikan job yang bertanggung jawab. Jika rutinitas dalam melaksanakan, maka dapat menyelesaikan

setiap tugas dengan cepat karena tidak harus banyak berpikir. Jadi, hindari kebiasaan buruk yang membuat pekerjaanmu menjadi menumpuk. Maka akan lebih bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa mengatur waktu dan menentukan prioritas dalam pekerjaan adalah hal mutlak yang dilakukan. Karena, dua hal tersebut sangat berpengaruh pada efektivitas sekaligus efisiensi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi, dengan beberapa cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi, akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dari pekerjaan kamu.

Peneliti menanyakan apa solusi yang dilakukan pendamping untuk meningkatkan efektivitas terhadap program keluarga harapan

Ya mungkin mbak, saya lebih memprioritaskan pekerjaan yang terpenting dulu mbak. Biar selesai tepat waktu gak molor-molor juga, karena sudah punya tanggung jawab dalam pekerjaan ini. Jadi saya fokus satu persatu pekerjaan mana dulu yang harus dikerjakan dan juga bisa meningkatkan efektifitas PKH". (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 27 Mei 2021)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, prioritas utama menjadi pendamping yaitu menerapkan cara meningkatkan efektifitas dalam sebuah pekerjaan dan juga pada program PKH ini.

Peneliti menanyakan tentang kesulitan apa saja yang dialami untuk meningkatkan efektivitas terhadap Program Keluarga Harapan

Sejauh ini tidak ada kesulitan mbak, ya Alhamdulillah lancar-lancar saja sehingga efektif dalam kegiatan maupun program ini". (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 27 Mei 2021)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pendamping tidak memiliki kesulitan dalam meningkatkan efektifitas pkh itu sendiri maupun kegiatan yang dilakukan. Jadi dapat dikatakan efektif dalam program ini.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

Peneliti menanyakan apakah bisa terlihat perubahan-perubahan KPM setelah adanya PKH

Jelas sangat terlihat mbak perubahannya, banyak KPM yang sudah bisa mensekolahkan anaknya lagi. Yang tadinya berhenti sekolah karena tidak punya biaya, sekarang bisa membiayai anaknya sekolah lagi dengan adanya bantuan ini”. (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Saya sebagai penerima PKH merasakan sangat ada perubahan dalam tingkat ekonomi yang telah diberikan bantuan oleh pemerintah. Sangat bermanfaat sekali program ini”. (Ibu Sumriyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Adanya program PKH ini menjadi perubahan hidup untuk saya, kebutuhan saya menjadi ringan mbak. Anak saya juga bisa sekolah dan tidak punya tunjangan pembayaran sekolah”. (Ibu Rukaiyeh, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, PKH ini menjadi perubahan ekonomi KPM yang kurang mampu dan memiliki anak yang tingkat pendidikan rendah atau anggota keluarga lansia, dan disabilitas. Sebagai KPM pun bisa merasakan adanya perubahan setelah diberikan bantuan program PKH.

Teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam pemberdayaan ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin. Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi

dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas juga memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Peneliti menanyakan tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas melalui program keluarga harapan

Ya kalau langkah-langkah ya paling menyampaikan komunikasi informasi yang terbuka kepada KPM, sehingga KPM juga bisa berdiskusi dengan baik mengenai informasi yang telah di berikan dari atasan. Jadi, dengan begitu kan bisa meningkat efektivitas PKH mbak”. (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 27 Mei 2021)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, mengembangkan komunikasi yang terbuka disaat melakukan pertemuan rutin atau kegiatan sosialisasi. Memberikan KPM kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi.

Ada empat komponen dalam kemampuan pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan, dan mengecek kembali. Proses pemecahan masalah digambarkan pada gambar berikut:

1. Tahap memahami masalah, pelajar sering gagal dalam menyelesaikan masalah karena semata-mata mereka tidak memahami masalah yang dihadapinya. Untuk dapat memahami suatu masalah yang harus dilakukan adalah pahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi yang diperoleh cukup, kondisi/syarat apa yang harus terpenuhi, nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang lebih operasional sehingga mempermudah untuk dipecahkan. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah dapat diperoleh dengan rutin menyelesaikan masalah. Selain itu, ketertarikan dalam menghadapi tantangan dan kemauan untuk menyelesaikan masalah merupakan modal utama dalam pemecahan masalah.
2. Tahap kedua membuat perencanaan yakni memilih rencana pemecahan masalah yang sesuai dan bergantung dari seberapa sering pengalaman siswa menyelesaikan masalah sebelumnya. Untuk merencanakan

pemecahan masalah siswa dapat mencari kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi atau mengingat kembali masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan sifat/pola dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian baru siswa menyusun prosedur penyelesaiannya.

3. Tahap melaksanakan perencanaan dimana langkah ini lebih mudah daripada merencanakan pemecahan masalah, yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan ketekunan dan ketelitian untuk mendapat penyelesaian.
4. Tahap memeriksa kembali, pada kegiatan ini adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada strategi lain yang lebih efektif , apakah yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau strategi dapat dibuat generalisasinya. Ini bertujuan untuk menetapkan keyakinan dan memantapkan pengalaman untuk mencoba masalah baru yang akan datang.

Peneliti menanyakan tentang upaya atau solusi apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program keluarga harapan

Dari tahun 2016 pemerintah menambahkan kategori program PKH mbak, ditambahnya itu lansia atau lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pemerintah juga tidak hanya memberikan bantuan tingkat Pendidikan melainkan juga untuk Kesehatan. Dengan begitu kan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program PKH ini dipantau juga oleh pemerintah bagaimana program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran atau tidak, gitu mbak”. (Ibu Halimah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, dengan memberikan solusi yaitu membuat program PKH untuk meringankan ekonomi bagi penerima yang kurang mampu.” (Ibu Samiatun, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Pemerintah pastinya memantau bagaimana program PKH ini berjalan sesuai dengan arahan atau tidak. Jadi kalau semua kegiatan atau informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepak KPM, maka program PKH bisa meningkatkan efektifitas”. (Ibu Subaidah, selaku KPM desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 21 Mei 2021)

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah sudah memberikan solusi dan upaya untuk meringankan beban masyarakatnya, dan juga memantau program PKH tepat sasaran atau tidak yang diberikan kepada keluarga atau masyarakat yang kurang mampu.

Salah satu solusi dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan program PKH, yaitu dengan adanya peran serta pendamping sosial PKH dan juga pemerintahan terkait dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH seperti yang telah dijelaskan pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), (Kementerian Sosial, 2018:28)

Peneliti menanyakan bagaimana upaya pendamping dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program PKH

Upaya saya ya menjalankan perintah atau tugas yang telah diberikan untuk pendamping menyampaikan informasi atau materi apa yang harus disampaikan kepada penerima PKH. Melakukan tugas dengan benar, dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi komitmen saya mbak sebagai pendamping”. (Ibu Maryam, selaku pendamping PKH desa Sukolilo Timur, wawancara dilakukan 27 Mei 2021)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, pendamping juga menjadi peran penting bagi program PKH ini untuk meningkatkan efektifitas kebijakan public yang telah dibuat oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menyatakan pelaksanaan PKH di desa Sukolilo Timur tersebut berjalan dengan baik dan cukup efektif. Seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, pelaksanaan program, monitoring program semuanya berjalan dengan baik. Kualitas, yang dulunya tidak mempunyai *handphone* sekarang bisa memiliki, yang dulunya tidak bersekolah bisa bersekolah.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat mengakui betapa pentingnya peran pendamping PKH di desa Sukolilo Timur untuk membantu KPM jika mengalami kesulitan. Karena keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didukung oleh antusias pendamping PKH, faktor pendukung lainnya adanya dukungan dari Aparat Desa dan antusias masyarakat Desa Sukolilo Timur itu sendiri. Faktor penghambatnya tidak adanya dukungan dari aparat desa, tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan tidak adanya fasilitas yang menunjang untuk pendamping PKH. Faktor komunikasi yang kurang baik, karena adanya KPM seperti lansia dan penyandang disabilitas yang memiliki faktor fisik yang kurang menjadi faktor penghambat untuk peningkatan efektifitas.

Salah satu solusi dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan program PKH, yaitu dengan adanya peran serta pendamping sosial PKH dan juga pemerintahan terkait dengan melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan PKH. Mengembangkan komunikasi yang terbuka disaat melakukan pertemuan rutin atau kegiatan sosialisasi. Memberikan KPM kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi bisa menjadikan solusi untuk peningkatan efektifitas program PKH. Pendamping juga menjadi peran penting bagi program PKH ini untuk meningkatkan efektifitas kebijakan public yang telah dibuat oleh pemerintah.

5.2 Saran

- 1) Diharapkan kepada Aparatur Desa Selaku Kepala Desa dan jajaran ke bawahnya agar dapat selalu mendukung jalannya program PKH ini. Agar program ini berjalan dengan baik.
- 2) Untuk warga yang menjadi peserta PKH diharapkan agar selalu mengikuti pertemuan rutin setiap bulannya agar dapat memahami dengan jelas tentang Prgram Keluarga Harapan.
- 3) Diharapkan kepada peserta PKH yang mendapatkan bantuan PKH di Desa Sukolilo Timur harus menggunakan dana tersebut dengan sebaikbaiknya jangan malah disia-siakan dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan para peserta sendiri, terlebih lebih seharusnya dana yang mereka dapatkan dipergunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan agar cita-cita dan tujuan PKH dapat terwujud
- 4) Pendamping diharapkan terus melakukan verifikasi calon KPM untuk memutakhirkan data penerima PKH. Pendamping harus tetap melakukan monitoring guna mengamati keseharian calon penerima PKH agar tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Ahmadi, H. Abu. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal 190. 1991
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'ad, Mohammad. 2001. *Psikologi Industri. Edisi Keempat*. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Liberty
- Atmosoeparto, Kisdarto, 2000. *Menuju SDM Berdaya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bambang, Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Beni, Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dheby, Clara, Abdul Kadir Adys, dan Muhammad Idris. 2017. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Vol. 3 No. 2. Jurnal Administrasi Publik.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Fajriati, Nurul Irtiah, Nurida Isnaeni, dan Ridhwan. 2020. *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Vol. 1 No. 1.
- Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Liberty: Yogyakarta

- Julia, Sopha, 2010. *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kalsum, Umi, Nurul Umiati, dan Hayat Hayat. 2019. *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang*. Vol. 13 No. 6. Hal 70-76. Respon Publik.
- Kementrian Sosial RI. 2012. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta ID): Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Muasaroh. 2010. *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Universitas Brawijaya Malang
- Nadijah, Nurul, Hesti Lestari. 2019. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Volume. 8 No. 2. Hal 69-87. Journal Of Public Policy and Management.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Profram Keluarga Harapan. 2018. Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Diakses melalui website <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181009100838.pdf> pada tanggal 11 Juni 2021
- Rahmawati, Evi, Bagus Kisworo. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*. Volume. 1 No. 2. Hal 161-169. Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment.

- Rafiudin, Muhammad, Leo Agustino, dan Deden M Haris. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta. Binaman Aksara.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sasmito, Cahyo. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu*. Volume. 3 No. 2. Hal 68-74. *Journal of Public Sector Innovation*.
- Siagian, P. Sondang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Jakarta : Kencana
- Siahaan, Marihot Pahala. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Tirani, Oktavia. 2017. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso*. Volume. 5 No. 6. Hal 1-9. *E Jurnal Katalogis*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Usman, Claudio. 2014. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo)*. Volume. 2 No. 001. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Virgoreta, Dyah Ayu. 2015. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*. Volume. 3 No. 1. Hal 1-6. *Jurnal Administrasi Publik*.

Wesha, Permata. 1992. *Kinerja Organisasi*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Wulandari, Felinda, Yamardi Yamardi, dan Titin Rohayatin. 2020. *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*. Volume. 4 No. 1. Hal 31-46. Jurnal Caraka Prabu.

<https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 29 Januari 2021

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> diakses tanggal 7 Februari 2021

<https://www.seputarpengertian.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-contoh.html> diakses tanggal 7 Februari 2021

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-solusi/> diakses tanggal 8 Februari 2021

<https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/> diakses tanggal 8 Februari 2021

<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/12/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html> diakses tanggal 20 Mei 2021

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> diakses tanggal 9 Juni 2021

<https://www.google.com/search?q=efektivitas+menurut+sondang+p+siagian&oq=efektifitasmenurut&aqs=chrome.5.69i57j0i1019.11503j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses tanggal 9 Juni 2021

<https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021

<https://www.jakartakerja.com/cara-meningkatkan-efektivitas-dan-efisiensi-kerja/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021

<https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf> diakses
pada tanggal 16 Juni 2021

<https://nasional.kontan.co.id/news/pkh-2021-berikut-syarat-kriteria-dan-besar-bantuan-penerimanya> diakses pada tanggal 8 Juli 2021

LAMPIRAN

HASIL DOKUMENTASI FOTO



Wawancara dengan Ibu .. selaku penerima PKH di Desa Sukolilo Timur Kec.
Labang Kab. Bangkalan



Wawancara dengan Ibu .. selaku penerima PKH di Desa Sukolilo Timur Kec.
Labang Kab. Bangkalan



Wawancara dengan Ibu .. selaku penerima PKH di Desa Sukolilo Timur Kec.
Labang Kab. Bangkalan



Wawancara dengan Ibu .. selaku penerima PKH di Desa Sukolilo Timur Kec.
Labang Kab. Bangkalan



Wawancara dengan Ibu .. selaku penerima PKH di Desa Sukolilo Timur Kec.
Labang Kab. Bangkalan



Wawancara dengan Ibu .. selaku penerima PKH di Desa Sukolilo Timur Kec.
Labang Kab. Bangkalan